

Judul : Ambigu Melawan KKB
Tanggal : Senin, 13 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ambigu Melawan KKB



Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A.
Dosen Tamu Sesko TNI

SUDAH 6 hari sejak pesawat penumpang milik Susi Air dibajak dan dibakar di daerah Timika oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya. Pesawat membawa 5 penumpang dengan Pilot Philips warganegara Selandia Baru dan barang bawaan seberat 452 Kg. Setelah mendarat di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pesawat dibakar.

Pihak TNI dan Polri dikabarkan mengedepankan dialog dengan KKB, minimal membebaskan pilot dan semua penumpang. Sampai kapan proses dialog itu? Tidak ada yang tahu.

Yang memprihatinkan juga,

Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, sampai Sabtu yang baru lalu, mengaku TNI belum tahu di mana pesawat yang naas itu. Ketika dibajak oleh kelompok pemberontak, tidak ada saksi yang menyaksikan.

Kelompok KKB (dulu Kelompok Papua Merdeka) sudah lama memerangi Pemerintah RI, dengan tujuan melepaskan Papua Barat dari kedaulatan Republik Inonesia. Mereka sejak awal kerap berdiplomasi hingga ke forum PBB (a) menolak keabsahan pemilu (penentuan Pendapat Rakyat) tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 yang telah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB; (b) menuntut pemilu ulang di seluruh Irian Barat.

Papua Barat semakin bergolak sejak 10 tahun yang lalu. Sepanjang 2022 13 anggota TNI dan Polri dan 19 sipil tewas dalam bentrok bersenjata. Hampir semua modus operandinya sama: aparat keamanan kita tiba-tiba diserang tidak berdaya. Ada kesan aparat keamanan kita beroperasi tanpa perlindungan intelijen yang memadai.

Salah satu bentrok dua kelompok massa yang menelan korban sekitar 18 orang terjadi dalam pembakaran Karaoke

Double 0 di Sorong, Senin, 24 Januari 2022.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai kekacauan dan situasi tidak aman di Papua karena TNI tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah konflik di Papua. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari, serta kejelasan anggaran yang harus dikucurkan.

"TNI harus menyadari bahwa penyelesaian konflik di Papua melalui UU No 34/2004 khususnya Operasi Militer, selain perang dalam menghadapi kelompok separatis, atau menggunakan UU No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan, Terorisme, Perpresnya belum pernah turun," kata Hasanuddin Sabtu yang lalu.

Oleh sebab itu, UU No 9 tahun 2013 tidak bisa dijalankan, *wong* Perpresnya sampai hari ini belum ada. "Tanpa landasan hukum yang kuat, TNI akan sulit mengembangkan model-model operasinya," tandas politisi senior PDI Perjuangan ini, sebelum Komisi I DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan

para petinggi dari ketiga matranya, Kasal, Kasau dan Wakil Kasad (Kasad berhalangan karena harus menghadiri Raker TNI di Palembang).

Kenapa Perpres untuk melaksanakan UU No 9 Tahun 2013 tidak kunjung turun? Tampaknya, masih ada pihak-pihak yang tidak punya kesepakatan tentang siapa itu KKB? TNI berpendapat KKB kelompok bersenjata yang harus dihadapi dengan pasukan bersenjata pula.

Sebaliknya, Polri tetap berpendapat KKB kelompok kriminal yang beroperasi untuk merampas harta rakyat sipil. Maka, Polri yang menjadi domain penumpasannya. Aneh kan?

Apakah terhadap kelompok bersenjata yang hendak membawa Papua merdeka lepas dari NKRI (Papua merdeka) kelompok sipil yang jelas-jelas kelompok bersenjata yang bertujuan memerangi tentara kita dengan tujuan membawa Papua merdeka, pemerintah tetap tidak punya sikap tegas untuk mengambil keputusan akhir!!

Tidak heran, suatu ketika dalam diskusi 4 mata dengan seorang perwira tinggi TNI berbintang tiga saya bertanya: Seberapa besar sesungguhnya

kekuatan KKB di Papua?

Ya jawab dengan serius: "Kecil, Prof!"

Kenapa selama ini TNI terkesan tidak mampu menhangcurkan KKB? Kenapa selama ini cukup banyak personil TNI, juga Polri, "mati" jadi korban "serangan gerilya" kelompok bersenjata itu?

"Ya, karena kami tidak punya kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang yang dijamin dalam UU No 9 tahun 2013."

Ironis sekali, untuk menghilangkan kata "kriminal" dalam KKB saja, Pemerintah tidak mampu. Karena mereka dikategorikan "kriminal", tentu hanya polisi yang berwenang menanganinya/memberantasnya. Namun, *de facto*, kelompok ini dibekali dengan berbagai senjata yang canggih dan pelatihan ala tentara yang profesional.

Melalui forum ini, kita imbau kepada Presiden Jokowi untuk segera secara serius mengambil sikap, bagaimana kebijakan negara mengatasi KKB; jangan sampai korban jiwa terus berjatuhan. Dan berita mengenai pembajakan yang disertai pembakaran pesawat penumpang *Susi Air* tentu bergaung juga di dunia internasional karena pilotnya seorang warganegara Selandia Baru! (*)